

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS BIROKRASI PEMERINTAHAN DIGITAL UNTUK MENGATASI PANDEMI COVID – 19 DI INDONESIA

Septony B Siahaan, Arthur Simanjuntak, Wesly A Simanjuntak, Dompok Pasaribu

Universitas Methodist Indonesia
as_smjt@rocketmail.com

ABSTRACT

Since 2019, many countries in the world have faced health, economic, social and political shocks and difficult challenges to deal with the COVID-19 pandemic, including Indonesia. With these conditions, the performance of the government system in dealing with the pandemic is tested transparently in public. However, the implementation of good governance by the Indonesian government itself is carried out with steps and decisions that will be taken and implemented through the government bureaucracy digitally to the community in order to reduce the positive number of COVID-19. The implementation of good governance also needs to be supported by other important elements that are improved by the digital governance bureaucracy, namely transparency, accountability, efficiency and effectiveness.

Keywords: *Good Governance, COVID-19 Pandemic, Digital Government Bureaucracy.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, *good governance* harus berbasis sistem elektronik sebagai birokrasi digital. Namun, karena birokrasi secara klasik beralih dari informasi berbasis kertas ke informasi elektronik sebagai birokrasi digital, pergeseran tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang signifikan, peningkatan produktivitas yang signifikan, dan penyampaian layanan kepada publik yang lebih efisien (Abdou, 2021). Peringkat *Electronic Government Development Index* (EGDI) 2018, Indonesia masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (peringkat 88 EGDI), Filipina (peringkat 75 EGDI), Thailand (peringkat 73 EGDI), Brunei Darussalam (peringkat 59 EGDI), Malaysia (peringkat 48 EGDI), dan Singapura (peringkat 7 EGDI). Posisi kelima hingga pertama, berturut-turut diraih oleh Swedia, Inggris, Republik Korea, Australia, dan Denmark. Pada 2018 Indonesia menduduki peringkat 107 EGDI, naik 9 peringkat daripada tahun 2016 yang berada di peringkat 116. Indonesia menduduki peringkat 7 ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016

(<https://bpptik.kominfo.go.id/2018/08/23/5938/survei-pbb-2018-peringkat-e->

[government-indonesia/](https://bpptik.kominfo.go.id/2018/08/23/5938/survei-pbb-2018-peringkat-e-government-indonesia/)). Peran birokrasi secara digital dalam meningkatkan *good governance* melalui kerja sistem pengelolaan keuangan daerah secara elektronik atau digital untuk meningkatkan empat indikator dasar pelaksanaan *good governance*, karena tidak mungkin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik tanpa indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Birokrasi secara digital digunakan untuk memastikan dan memberikan transparansi dalam tindakan politik dan administratif serta transparansi dalam informasi, penyajian, dan ketersediaan kepada warga negara dan lembaga masyarakat sipil (Abdou, 2021). Penerapan digital birokrasi juga berperan penting dalam akuntabilitas kepada publik, melalui keberadaan sistem untuk memantau dan mengontrol efisiensi kinerja pemerintah, yang dapat membantu dalam membatasi penyebaran korupsi di tanah air. Penerapan birokrasi secara digital juga mendukung efisiensi dan efektivitas melalui fungsi perencanaan elektronik dan regulasi elektronik yang membantu pengambil keputusan untuk berhasil mengatasi krisis ekonomi nasional.

Berdasarkan beberapa pernyataan dan permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas peraturan dan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan birokrasi secara digital untuk mewujudkan *good governance* dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan apakah langkah yang diambil sudah tepat untuk menekan angka positif tersebut. Covid-19. COVID-19 di Indonesia mulai berkurang setiap harinya. Baik istilah *good governance* maupun *good government* berasal dari bahasa latin yang artinya: *how to organizer and direct government to be better*. Pada abad ketiga belas, istilah (*governance*) digunakan dalam bahasa Prancis sebagai sinonim untuk istilah *government*, kemudian sebagai istilah hukum pada tahun 1478 dan kemudian termasuk tuntutan demokrasi, tetapi pada tahun 1937 (*governance*) dalam bahasa Inggris. Sebagai konsep untuk menjalankan suatu lembaga ekonomi. Pada pertengahan 90-an abad terakhir, fokusnya menjadi pada dimensi politik dan kelembagaan dari konsep tersebut.

Pergeseran dilakukan pada penggunaan konsep tata pemerintahan yang baik secara intensif, terutama oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional, regional dan lokal lainnya, untuk mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi kebijakan ekonomi dan administrasi. Khusus untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kinerja politik dan ekonominya di satu sisi, dan meningkatkan efektivitas bantuan internasional yang diberikan kepadanya untuk mengelola urusan publik ke arah pembangunan dan pembangunan di sisi lain, misalnya, Bank Dunia menggunakan istilah *good governance* untuk menunjukkan pemerintahan yang menunjukkan perbaikan dalam administrasi publik dan politik.

Virus Covid-19 saat ini sedang mewabah di Indonesia dan Anda bisa merasakan dampak nyata dari merebaknya pandemi Covid19 di Indonesia. Selain itu, aktivitas terkait seperti pekerjaan, sekolah, dan aktivitas jual beli mudah terganggu. Apalagi saat Presiden Jokowi memperpanjang jarak

sosial pada 15 Maret 2020, menyerukan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Kita mengenal konsep *good governance* dalam konteks menilai seberapa baik kinerja pemerintah (*good governance*). Sejak diumumkannya aktivitas harian aktif COVID-19 di Indonesia, masyarakat masih merasa bahwa jalur komunikasi dan pedoman penanganan pemerintah belum dikelola dengan baik.

Selain itu, prioritas nilai pemerintah yang condong ke arah kebijakan ekonomi, tampak mengabaikan keamanan publik, dalam hal ini masyarakat luas. Ekonomi sangat mendasar sehingga tidak ada krisis, tetapi ketika pandemi menjadi ancaman yang ditargetkan, hak untuk hidup dan keselamatan semua warga negara harus diprioritaskan tanpa kecuali.

Setelah Indonesia dinyatakan sebagai negara yang terkena virus Covid-19, ekspektasi buruk sepertinya tidak direncanakan tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga dalam penanganan berbagai fasilitas kesehatan itu sendiri. Akibatnya, kohesi sosial belum tercapai karena penanganan COVID-19 yang tidak jelas, minimnya panic buying, dan mahalannya berbagai jenis kebutuhan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, birokrasi secara digital dianggap sebagai kunci utama dari dampak negatif krisis global selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, birokrasi secara digital berusaha untuk mencapai penggunaan sumber daya yang optimal dengan cara yang melayani anggota masyarakat dan dengan cara yang menjamin hak-hak generasi mendatang dan bekerja untuk mengatasi tata pemerintahan yang baik yang membantu menangani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan dampak birokrasi secara digital dalam mekanisme implementasi *good governance* dalam manajemen krisis, dan implementasi *good governance* dengan mengevaluasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air.

LANDASAN TEORI Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan berita merebaknya virus yang bernama Virus Corona atau Covid-19. Covid-19 adalah virus yang dapat menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019. Virus tersebut kemungkinan berasal dari Grosir Makanan Laut Pasar Huanan di Wuhan, yang telah dikaitkan dengan kasus yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Virus tersebut diketahui berasal dari pasar basah dengan interaksi intens antara penjual dan pembeli dengan tingkat kebersihan yang minim, laporan juga menunjukkan bahwa di pasar itu memperdagangkan hewan liar secara bebas, termasuk ular, landak, dan rusa. Asal usul virus yang baru tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar muncul pada kelelawar, kemudian membuat lompatan ke manusia melalui inang hewan liar lainnya (Helen Briggs, 2020) dan (Abdou, 2021).

Dalam perkembangannya, wabah penyakit Covid-19 telah menyebar ke 215 negara di dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020, telah menyatakan wabah virus corona baru (Covid-19) sebagai pandemi global (Cucinotta & Vanelli, 2020). Status Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global akibat penyebaran kasus positif di luar China yang memuncak hingga peningkatan 13 kali lipat di negara-negara terinfeksi. Virus ini berkembang sangat pesat karena sifatnya yang cepat menyebar melalui droplet dan didukung oleh mobilitas manusia yang sangat pesat tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga lintas negara. Berdasarkan data Worldometer, saat ini kasus positif Covid-19 pada 20 Mei 2020 telah mencapai 4.961.283 dan menyebar ke 215 negara di seluruh dunia (Worldometer, 2020). Kehadiran Covid-19 sebagai pandemi global dalam menghadapi dunia telah menimbulkan masalah baru bagi setiap negara yang terjangkit virus tersebut, termasuk Indonesia.

Total kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.775, Kasus Positif Covid-19 di

Indonesia Per 1 September 2020 menjadi 177.571 (detik.com) (Sumber: Wahyono, Edi. (1/9/2020)) Jumlah pasien sembuh mengalami peningkatan 2.098 kasus, sedangkan kasus kematian meningkat 88 kasus. Pemeriksaan dilakukan dengan *polymerase chain reaction* (PCR) dan *molekuler rapid test* (Tendi Mahadi & Case, 2020). Besarnya penyebaran virus Covid-19 sejak Januari 2020 hingga saat ini, meski mengalami penurunan yang signifikan, tetap tak terbendung. Keterlambatan identifikasi dini penyebaran virus, lemahnya kebijakan proteksi *Regional Entry Points* di suatu negara atau kawasan, keterlambatan respon sistematis negara dalam pengendalian penyebaran virus, hingga minimnya pasokan alat keselamatan diri dan kesehatan. fasilitas, merupakan salah satu dari beberapa faktor mengapa penyebaran virus menjadi begitu masif di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Wabah dan penyebaran virus Covid-19 bisa membuat banyak orang sakit, terinfeksi, bahkan mematikan. Selain itu, minimnya alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan membuat tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat sangat rentan, bahkan beberapa tenaga kesehatan bahkan bisa terinfeksi virus Covid-19. Di sini, pemerintah memeriksa semua kebijakan dan peraturan untuk melihat apakah mereka memenuhi konsep pemerintahan yang baik atau apakah ada upaya menuju tata pemerintahan yang baik (setidaknya UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Negara). Kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan untuk mengatasi pandemi Covid-19 adalah kehidupan mereka yang sangat terancam oleh pandemi Covid19 dari segi keselamatan jiwa melalui ancaman kesehatan dan keamanan. Mirip dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menghadapi wabah Covid-19.

Implementasi *Good Governance*

Good governance merupakan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pergeseran ini dikenal dengan pergeseran paradigma *government-to-governance* sebagai bentuk

interaksi sosial-politik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi isu-isu kontemporer yang kompleks, dinamis, dan beragam (Amirul, Muis, & Rusli, 2014).

Pemahaman yang lebih baik tentang dampak kepemimpinan terhadap tata pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat diperoleh melalui tinjauan konsep dan teori tata kelola yang baik. Kelompok Bank Dunia (2011) mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai cara kekuasaan dijalankan melalui lembaga-lembaga ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Ini adalah kepemimpinan politik suatu negara dalam menjalankan kekuasaannya. Menurut Kelompok Bank Dunia (2011), tata kelola adalah tradisi dan institusi yang digunakan otoritas di suatu negara untuk kebaikan bersama.

Pemerintahan dipandang sebagai pelaksanaan kekuasaan ekonomi, politik dan administratif untuk mengendalikan kegiatan di semua tingkat negara. Ini terdiri dari mekanisme, proses, dan institusi bagi warga negara dan kelompok untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menyelesaikan perselisihan mereka.. Institut Pemerintahan, Ottawa (*Institute of Governance*, Ottawa). "Governance terdiri dari institusi, proses, dan konvensi dalam masyarakat yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, seberapa penting keputusan yang mempengaruhi masyarakat dibuat, dan bagaimana berbagai kepentingan diberikan tempat dalam keputusan tersebut." Institut Internasional Ilmu Administrasi menyatakan "Pemerintah mengacu pada proses dimana elemen dalam masyarakat memegang kekuasaan dan otoritas, dan mempengaruhi dan menegakkan kebijakan dan keputusan mengenai kehidupan publik, dan pembangunan ekonomi dan sosial".

Istilah "pemerintahan yang baik" (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), 1997) digunakan untuk menjalankan otoritas ekonomi, politik dan administratif untuk mengendalikan urusan nasional di semua tingkat, dan untuk

mempromosikan kohesi sosial. Ini didefinisikan sebagai cara yang diadopsi oleh negara. Integrasi pembangunan dan pertimbangan untuk kesejahteraan warga negara. Tata Kelola yang Baik mencakup semua metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya publik, termasuk pembangunan infrastruktur. Ini mencakup mekanisme dan proses kelembagaan di mana warga negara dan kelompok mengklarifikasi kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menyelesaikan ketidaksepakatan mereka. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik adalah proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan untuk mengelola sumber daya publik, termasuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan warga negara.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) mengartikulasikan delapan karakteristik utama pemerintahan yang baik. UNESCAP (2012) Tata pemerintahan yang baik antara lain adalah partisipatif, konsensus, akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, efektif dan efisien, adil, inklusif, dan supremasi hukum. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara atau agen. Tata kelola yang baik membutuhkan kerangka hukum yang adil yang menawarkan perlindungan bagi semua warga negara, terutama minoritas dan yang kurang beruntung dalam masyarakat. Ini juga mensyaratkan bahwa institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan (Kemp et al., 2005). Sifat responsif pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa lembaga dan proses pengambilan keputusan setuju untuk melayani setiap elemen masyarakat. Akuntabilitas merupakan komponen penting dari tata pemerintahan yang baik yang mengharuskan mereka yang berwenang untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada mereka yang mereka kelola (United Nations, 2007).

Birokrasi Pemerintahan Berbasis Digital

Bank Dunia mendefinisikan birokrasi pemerintahan digital sebagai istilah modern yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi serta komunikasi untuk peningkatan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk memberantas korupsi dan mendorong warga negara. untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik di berbagai sektor (Abdou, 2021). Dapat dikatakan di sini bahwa Bank Dunia menegaskan bahwa reformasi birokrasi melalui manajemen elektronik adalah salah satu sarana penting dalam menerapkan kualitas layanan dan tata kelola yang baik yang dapat membantu dalam manajemen krisis.

Begitu seseorang mulai memahami gagasan bahwa organisasi birokrasi belum tentu menjadi alasan utama kurangnya administrasi dan layanan di sektor publik yang dialami oleh seluruh dunia sejak tahun 1980-an, tetapi penyebabnya dapat ditemukan dalam kompleksitas yang semakin meningkat, dan informasi yang berlebihan di prosedur administrasi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita bisa mencari solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang kami ajukan dalam penelitian ini didasarkan pada reformasi birokrasi dengan pengertian birokrasi elektronik. Bahkan, istilah ini sering digunakan sebagai sinonim untuk *e-government*.

Namun, Muellerleile, C., & Robertson, SL (2018) percaya bahwa perlu diingat bahwa alasan yang mendorong untuk mengusulkan pembentukan birokrasi pemerintah digital sebagai tujuan utama dari kebijakan pemerintah tidak selalu sesuai dengan satu kesatuan. pendekatan *e-government* yang memprediksi saling ketergantungan. Misalnya melalui portal pemerintah yang menyediakan akses layanan pemerintah melalui akses terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid untuk

tujuan menentukan, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah yang diteliti (Sugiyono and Hariyanto, 2012), (Situmorang & Simanjuntak, 2021), dan (Simanjuntak et al., 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Siahaan & Simanjuntak, 2020) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Pendekatan kualitatif adalah serangkaian kegiatan atau proses untuk menangkap informasi tentang suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan suatu objek, terkait dengan suatu masalah baik secara teoritis maupun praktis (Chairul, 2008).

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (*Literature Review*). Tinjauan Pustaka (*Literature Review*) adalah digunakan untuk memfokuskan pada mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian dengan metode penelitian tertentu atau penelitian dan pengembangan yang dilakukan terkait dengan bidang studi tertentu (Triandini, et al., 2019). *Literature review* yang digunakan dalam penelitian ini pertama-tama menemukan beberapa jurnal penelitian, termasuk jurnal penelitian dalam negeri dan penelitian internasional, dan setelah beberapa tahap, peneliti berkolaborasi dengan jurnal penelitian melalui jurnal penelitian sebelumnya yang ditentukan (Simanjuntak et al., 2020), (Situmorang & Simanjuntak, 2021) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2019). *Literature review* dipahami sebagai segala upaya untuk memperoleh informasi yang relevan dan terkini tentang topik atau masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Jenis tulisan yang digunakan adalah studi *literature review* atau studi kepustakaan yang menitikberatkan pada temuan tulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Indonesia Terhadap Pandemi COVID-19: Kebijakan dan Regulasi. Penting bagi Indonesia untuk bertanya bagaimana Singapura telah mencapai kemajuan dan pembangunan di berbagai

sektor, dan bagaimana perekonomian Singapura menempati urutan ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) setelah ekonomi Amerika dalam beberapa tahun terakhir, dan bagaimana pendapatan per kapita rata-rata meningkat dalam beberapa tahun terakhir. tahun lalu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Al-Ameri, 2017) dan (Abdou, 2021). Jawaban sebenarnya adalah bahwa kekuatan negara terletak pada sumber daya yang dimilikinya di dalam dan di luar wilayahnya, dan dengan apa yang dapat diinvestasikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat melalui akses yang terintegrasi. Hal ini mencerminkan kekuatan dan pengaruh negara dalam bidang politik dan ekonomi di tingkat internasional, dan hal ini terjadi di Singapura (Abdou, 2021).

Singapura merupakan negara kedua setelah China yang terkena dampak pandemi Covid-19, kemudian disusul oleh negara-negara lain di dunia, tercatat Singapura mampu bertahan dari pandemi secara signifikan dibandingkan dengan banyak negara di dunia, dan Alasan utamanya adalah karena Singapura memiliki banyak elemen pembangunan pemerintahan. Berkelanjutan (Karena upaya mengesankan untuk memerangi epidemi, dan prosedur deteksi dan pengujiannya serta pembatasan pergerakan) berhasil menghentikan penyebaran COVID-19. (Fisher, 2020).

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah mengubah situasi di Indonesia untuk mewujudkan empat reformasi di bidang: industri, pertanian, pertahanan negara, ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia harus mampu membangun kebangkitan ekonomi dan menjadikan Indonesia negara besar seperti yang diimpikan. Saat ini, Indonesia mengalami perkembangan pesat, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (sebelum pandemi Covid-19).

Indonesia dipuji oleh *World Health Organization* (WHO) yang mengatakan upaya negara Indonesia untuk mencari orang yang terinfeksi dan tindakannya untuk membatasi penularan penyakit sudah sangat baik. Indonesia pada awal Maret 2021

menduduki peringkat ke-18 yang berhasil menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia dari beberapa negara yang terkena dampak pandemi Covid-19. Indonesia mengambil langkah awal untuk menahan virus yang berkontribusi memperlambat penyebaran epidemi seminimal mungkin. Pemerintah Indonesia menangani secara transparan semua tindakan yang diperlukan untuk memerangi epidemi, dan itulah sebabnya orang-orang mematuhi semua tindakan meskipun ada kontroversi dan terus mengejar pelanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia berada pada peringkat ke-53 dalam indeks ketahanan ekonominya yang mengalami kelemahan, risiko ekonomi tinggi, infrastruktur lemah, dan tingkat korupsi yang meningkat. Pemulihan ekonomi Indonesia akan bergantung pada pemulihan ekonomi negara-negara lain di dunia yang terkena dampak pandemi (Lindsay Galloway, 2020).

Reformasi birokrasi di Indonesia telah menggunakan kebijakan digital yang mengarah pada good governance agar terciptanya pelayanan yang berkualitas dan terintegrasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dapat tercapai dengan baik dengan menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan, efektivitas dan efisiensi harus diutamakan;
2. Sistem pengambilan keputusan yang desentralisasi terhadap alokasi sumber daya mengacu pada '*point of delivery*';
3. Pengaturan langsung yang fleksibel akan menghasilkan hasil kebijakan yang hemat biaya;
4. Menghasilkan pelayanan yang efisien serta efektif untuk menciptakan iklim kompetensi dan produktivitas yang;
5. Penguatan kapasitas strategis pemerintah sebagai regulator langsung yang akan mengarahkan organisasi pemerintah untuk mengevaluasi dan merespon berbagai perubahan eksternal dengan biaya rendah;
6. Fokus utama adalah penyelarasan wewenang dan tanggung jawab sebagai kunci peningkatan kinerja; dan
7. Pelaksanaan partisipasi masyarakat; transparansi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan prinsip birokrasi digital, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengubah praktik birokrasi atau penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif menuju praktik birokrasi atau administrasi pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Berdasarkan hubungan tersebut maka diperlukan adanya birokrasi secara profesional yang dapat menciptakan situasi yang kondusif dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi reformasi pada umumnya ditujukan untuk tiga hal, yaitu sistem yang mengaturnya, struktur organisasi, dan orang yang melaksanakannya.

Upaya lain untuk mendukung praktik manajemen birokrasi negara dapat digunakan dalam tiga cara utama untuk mendukung pelaksanaan misi negara. Pertama: Layanan manajemen elektronik berupa sistem aplikasi. Contoh: aplikasi eoffice dan aplikasi informasi bakat. Kedua: Penggunaan aplikasi komunikasi dan kolaborasi yang digunakan untuk konferensi video. Ketiga, penggunaan sistem e-government untuk mendukung aplikasi. Contoh: Kehadiran digital dan penyimpanan *cloud*.

Salah satu percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang harus diterapkan pemerintah adalah penggunaan aplikasi umum salah satunya di bidang kearsipan. Aplikasi umum untuk arsip ini mengarah pada integrasi dinamis layanan pengarsipan. Penerapan aplikasi umum di bidang kearsipan yang didukung oleh Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dicatat sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dapat dilihat bahwa birokrasi digital telah dicapai di Indonesia untuk merespon krisis pandemi. Dengan demikian, teknologi mesin membantu administrasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara teknologi birokrasi

membantu pemerintah beroperasi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa birokrasi digital membantu mengaktifkan mekanisme *good governance*, terutama dalam mengelola krisis, seperti keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Fitur luar biasa dari pengalaman Indonesia dalam mencapai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan serta mencapai implementasi reformasi bertahap seperti manajemen elektronik, yaitu mendefinisikan hubungan antara reformasi, pembangunan dan stabilitas atas dasar "Konsep Pembangunan" sesuai kebutuhan waktu, dalam transisi yang berkembang.

Negara-negara nasional biasanya, seperti Indonesia, membuat perubahan besar melalui reformasi yang akan mempengaruhi struktur sosial lama dan stabilitas sosial dan politiknya oleh birokrasi digital. Harus ditekankan bahwa reformasi didasarkan pada stabilitas dan tujuannya adalah untuk pembangunan nasional. Atas dasar ini, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mencapai pembangunan dan mendorong stabilitas melalui reformasi dan pembangunan berkelanjutan, yang telah mencapai keseimbangan dan keselarasan antara stabilitas, pembangunan dan reformasi (Jangeer & Abdou, 2020).

Namun, prevalensi legitimasi kinerja sebagai sumber dan pendorong kepercayaan politik, ditambah dengan kemampuan negara Indonesia hingga saat ini untuk mengatasi krisis dan terus menghasilkan pertumbuhan ekonomi, berarti kepercayaan politik sejauh ini relatif tinggi. Tentu saja, beberapa di antaranya juga dapat dikaitkan dengan pendekatan "semi-otoriter" negara Indonesia terhadap pemerintahan dan toleransinya yang rendah terhadap perbedaan pendapat (George, 2007; Hsu & Tan, 2020). Namun, negara Indonesia telah berhasil mempertahankan tingkat kepercayaan politik dan kepatuhan kebijakan yang relatif tinggi, yang keduanya berkontribusi pada kapasitas politiknya. Bagian penting lain dari pengalaman Indonesia adalah birokrasi pemerintah dan pencarian pembangunan, dan pemimpin dengan wawasan dan kebijakan yang sehat.

Di sini, negara berkembang yang perlu mengubah mode pembangunannya harus menyatukan rakyatnya dan memfokuskan kekuatan nasionalnya untuk memajukan reformasi ekonomi, sosial dan politik secara teratur, sehingga pemerintah perlu menggunakan birokrasi digital. Pada periode tertentu dan di wilayah tertentu, yang memiliki kekuatan politik yang kuat dan kemampuan mengelola secara efektif (Cordelia, 2007).

Untuk itu, Indonesia cenderung bertransformasi dari negara berkembang yang banyak mengalami masalah dan krisis menjadi negara yang memiliki unsur tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan yang nyata serta mampu menyelesaikan masalah dan krisis serta mengatasinya, melainkan persaingan dari negara-negara maju di dunia. bidang pembangunan dan kemajuan serta pemberian bantuan dan dukungan kepada negara-negara di dunia yang membutuhkan bantuan dan keahlian, serta pengalaman Indonesia dalam menghadapi dan mengelola krisis pandemi Covid-19 merupakan model penerapan good governance yang juga perlu didukung. oleh elemen penting lainnya yang ditingkatkan oleh Birokrasi Digital, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Namun, "kurangnya transparansi" dan penyembunyian informasi terkait kebijakan China terhadap virus masih awal. Penampilannya yang menyebabkan penyebarannya ke seluruh dunia dan berubah menjadi epidemi, misalnya Zhong Nanshan yang dikenal sebagai "pahlawan SARS" karena perannya yang besar dalam virus pada tahun 2003, dan episentrum penyebaran virus Corona, menegaskan bahwa pemerintah China merahasiakan banyak detail virus di awal. penampilannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Mekanisme utama good governance adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, manajemen digital membantu administrasi publik untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, sedangkan birokrasi membantu pemerintah beroperasi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, birokrasi digital membantu mengaktifkan mekanisme good governance, terutama dalam mengelola krisis, seperti keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Jika birokrasi digital benar-benar ingin dicapai dalam pemerintahan, maka dimensi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas harus tercapai dengan baik sebagai salah satu unsur good governance atau tata pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan akan memungkinkan pengelolaan krisis yang berkualitas dan terintegrasi. jasa.

Saat ini, pemerintahan yang baik mencakup semua aspek kebutuhan hidup yang diperlukan bagi anggota masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan yang bersih, kesejahteraan ekonomi, institusi politik yang kuat, pembangunan berkelanjutan, layanan berkualitas, dan manajemen krisis. Tata pemerintahan yang baik berfungsi untuk menjamin hak-hak generasi mendatang tanpa mengurangi atau merugikan hak dan kebutuhan generasi sekarang. Pandemi Covid-19 menyoroti kebutuhan mendesak akan birokrasi digital sebagai alat yang efektif untuk memberantas pandemi, karena pengelolaan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak ditemukan, tetapi sebagai hasil dari tata kelola yang benar-benar baik dan berkelanjutan. pengembangan, dan kualitas layanan yang berkaitan dengan dimensi yang berbeda.

Indonesia telah menunjukkan pentingnya birokrasi digital yang membantu pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19, karena berhasil dalam waktu singkat membuat kemajuan dalam mengelola pandemi dengan memanfaatkan unsur-unsur kebaikannya. Upaya-upaya ini telah mencapai puncaknya pada tingkat kematian terkait Covid-19 di Indonesia yang rendah dan penularan komunitas yang minimal di dalam warganya dan komunitas penduduk tetap. Namun, kurangnya kapasitas analitis Indonesia juga mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk secara akurat menilai dan mengatasi risiko infeksi yang

berasal dari asrama pekerja asing yang terlalu padat dan seringkali tidak dikelola dengan baik. Penanggulangan dan penanggulangan virus Covid-19 merupakan sesuatu yang dapat dicapai jika rencana penanggulangan diikuti secara serius dan tepat, dan semua itu pada akhirnya memerlukan ketersediaan bahan dan persyaratan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

SARAN

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan kebijakan digital yang mengarah pada good governance untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan terintegrasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 harus menstandarkan pelayanan publik yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan, infrastruktur, sistem informasi, pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta penciptaan inovasi pelayanan publik. Birokrasi digital dan standarisasi pelayanan sebagaimana tersebut di atas, kemudian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa didukung oleh profesionalisme aparturnya.

REFERENCE

- Abdou, Ahmed Mohammad. (2021). Good governance and COVID-19: The digital bureaucracy to response the pandemic (Singapore as a model). *Journal of Public Affairs*. 2021; e2656. <https://doi.org/10.1002/pa.2656>
- Al-Ameri, I. M. (2017). Development experience in Singapore, Center for Strategic and International Studies, University of Baghdad. *Journal of Middle East Research*, (45).
- Amirul, M., Muis, H., & Rusli, A. M. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 73–82.
- Chairul, Shaleh. 2008. *Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis*. Yogyakarta: CV. Jaya Abadi.
- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. *Acta Biomed*, 91(1), 157–160.
- Dale Fisher. (2020) Why Singapore's Coronavirus Response Worked—and What We Can All Learn, nextgov, Retrieved from <https://www.nextgov.com/ideas/2020/03/why-singapores-coronavirusresponseworkedand-what-we-can-all-learn/163907>
- Faris Ali Jangeer, Ahmed Mohammed Abdou, (2020), The problem of management bureaucracy and building good governance (the Kurdistan Region of Iraq for the period 2005–2019 as an example Vol. 23 No. 1, pp. 2020–2021.
- George, C. (2007). Consolidating authoritarian rule: Calibrated coercion in Singapore. *The Pacific Review*, 20(2), 127–145 [Taylor & Francis Online], [Web of Science®], [Google Scholar].
- Helen Briggs, (2020) Coronavirus: WHO developing guidance on wet markets, Retrieved from <https://www.bbc.com/news/science-environment-52369878>
- Hsu, L. Y., & Tan, M.-H. (2020). What Singapore can teach the U.S. about responding to Covid-19. *STAT*.
- Kemp, R., Parto, S., & Gibson, R. B. (2005). Governance for sustainable development: Moving from theory to practice. *International Journal of Sustainable Development*, 8(1/2), 12–30. doi:10.1504/IJSD.2005.007372
- Lindsay Galloway (2020), Coronavirus: Which Countries Are Most Able to Recover Post-Crisis? BBC, Retrieved from <https://www.bbc.com/arabic/vertcap-52204277>
- Liow, E. D. (2011). The neoliberal-developmental state: Singapore as case study. *Critical Sociology*, 38(2).
- Muellerleile, C., & Robertson, S. L. (2018). Digital Weberianism: bureaucracy, information, and the technorationality of neoliberal capitalism.

- Indiana Journal of Global Legal Studies*, 25(1), 187–216.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). *Jurnal manajemen*. 6(2), 129–138.
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2021). Pengaruh Strategic Management Accounting dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Pimpinan terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 100–108. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.4312>
- Sugiyono dan Hariyanto. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Tendi Mahadi, Rekor! Jumlah Kasus (2020) corona di Indonesia hari ini bertambah 973 kasus, Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/rekor-jumlah-kasus-corona-diindonesia-hari-ini-bertambah-973-kasus>
- Woo, J. J. (2018). The evolution of the Asian developmental state: Hong Kong and Singapore. Routledge [Crossref], [Google Scholar].
- Worldometers The site of worldometers, (2020) Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>